

Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti

Suhaimi¹ Eko Handrian²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,
Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
suhaimi@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Abstract

The food security program is an initiative by the village government to support community food resilience through the provision of seeds, agricultural tools, and technical training for farmer groups. This study aims to examine how the food security program is implemented by the Government of Lukun Village, Tebing Tinggi Timur District, Kepulauan Meranti Regency, and to identify the factors that hinder its implementation. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. The research informants consist of village officials, farmer group leaders, and program recipient community members. The findings reveal that the implementation of the food security program in Lukun Village has not been optimal. The main obstacles include lack of program socialization to the community, inaccurate targeting of aid, limited agricultural training, inadequate infrastructure, and weak program evaluation. Nevertheless, the program is considered beneficial to economically affected communities and has helped increase local participation in agricultural activities.

Keywords: Implementation, Food Security, Village, Public Policy

Abstrak

Program ketahanan pangan merupakan upaya pemerintah desa dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui pemberian bantuan bibit, alat pertanian, dan pelatihan teknis kepada kelompok tani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari perangkat desa, ketua kelompok tani, dan anggota masyarakat penerima program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan di Desa Lukun belum berjalan maksimal. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat, ketidaktepatan sasaran bantuan, minimnya pelatihan pertanian, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya evaluasi program. Meskipun demikian, program ini dinilai bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan dapat meningkatkan partisipasi warga dalam kegiatan pertanian lokal.

Kata kunci: Implementasi, Ketahanan Pangan, Desa, Kebijakan Publik

Pendahuluan

Ketahanan pangan merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan nasional, tidak hanya melibatkan ketersediaan pangan yang cukup dari segi kuantitas, tetapi juga kualitas pangan yang bergizi, aman, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Di Indonesia, ketahanan pangan menjadi isu strategis karena negara ini masih menghadapi

tantangan dalam menjamin kecukupan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk yang tersebar di seluruh nusantara.

Dengan kondisi geografis yang sangat beragam, dari pulau-pulau besar hingga daerah-daerah terpencil yang sulit diakses, masalah ketahanan pangan menjadi semakin kompleks. Di wilayah pedesaan, tempat sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal, ketahanan pangan sangat bergantung pada hasil pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perikanan, dan peternakan, membuat desa-desa di Indonesia rentan terhadap berbagai gangguan eksternal, seperti perubahan iklim, bencana alam, fluktuasi harga pangan, serta rendahnya akses terhadap teknologi pertanian yang efisien. Ketahanan pangan yang terjaga akan berdampak besar pada stabilitas sosial-ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh pangan dengan mudah, cukup, dan berkualitas, serta memiliki kemampuan untuk mengelola produksi pangan secara mandiri. Dalam konteks ini, berbagai program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan di desa, menjadi sangat vital untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang, pada setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan guna hidup yang aktif dan sehat. Ketahanan pangan sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup masyarakat, stabilitas sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Program ketahanan pangan menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Diversifikasi Pangan Lokal. Peraturan ini mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa komoditas pangan utama dan meningkatkan variasi pangan yang tersedia di masyarakat. Langkah-langkah yang diatur meliputi penyuluhan kepada petani, pemberian insentif untuk pengembangan tanaman pangan lokal, dan promosi konsumsi pangan lokal kepada masyarakat.

Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 32 Tahun 2023 mengatur Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2024. Peraturan ini mencakup berbagai aspek seperti sistematika, pendanaan, dan ketentuan penutup untuk mendukung program ketahanan pangan di provinsi.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan, Peraturan ini menetapkan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten. Dinas ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program ketahanan pangan di daerah, termasuk distribusi bantuan pertanian, penyuluhan teknis, dan monitoring produksi pangan.

Keadaan ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi fokus utama pemerintah daerah. Menurut data terkini, terdapat penurunan cadangan pangan sebesar 74.6% pada tahun 2021 akibat gagal panen beras di beberapa wilayah penghasil beras. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah mengembangkan bahan pokok alternatif seperti sagu,

yang diharapkan dapat menjadi pengganti makanan pokok. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong masyarakat untuk menanam tanaman di lahan terbatas seperti pekarangan rumah dan menjalankan program kesejahteraan petani dan peternak dengan memberikan bantuan alat pertanian, bibit tanaman, benih, pupuk bersubsidi, serta pelatihan dan sosialisasi. Bupati Meranti juga mengapresiasi hasil panen bawang merah di Rangsang dan bekerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan ketahanan pangan. Dengan berbagai inisiatif ini, Kabupaten Kepulauan Meranti berupaya mencapai kemandirian pangan dan mencegah krisis pangan di masa depan.

Desa Lukun di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, dikenal sebagai penghasil sagu yang cukup besar. Namun, produksi pangan di desa ini menghadapi berbagai tantangan seperti kebakaran lahan gambut yang sering terjadi, teknologi pertanian yang masih sederhana, dan ketersediaan air yang terbatas terutama selama musim kemarau.

Berdasarkan penyusunan program yang ada di desa Lukun peneliti fokus pada satu program yang menarik untuk diteliti yaitu program Pertanian. Berdasarkan wawancara awal peneliti dengan Bapak Khairul Azhar selaku sekretaris desa Lukun mengatakan bahwa program ini terdiri dari beberapa tahapan kegiatan yaitu melakukan Sosialisasi Program seperti memberikan pemahaman agar pembibitan menjadi produktif, pembentukan kelompok, yaitu terbagi dari tiga dusun, ada dusun Mawar, Dusun Anggek dan Dusun Melati. Dusun Mawar sebanyak 55 orang, Dusun Anggrek 109 orang, dan Dusun Melati 106 orang. Selanjutnya melakukan pelaksanaan kegiatan. (23 November 2023).

Hal ini dibenarkan dengan hasil observasi awal peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat, Saprizal, sebagai Kepala Dusun Mawar. Beliau mengatakan; “memang kita Desa ini sudah mendapatkan bantuan Dana Desa untuk ketahanan pangan dari pemerintah, hanya saja praktiknya tidak terlaksana dengan baik, saya contoh saja ketika bantuan diberikan seharusnya pemerintah Desa memberikan Dana yang tepat kepada orang yang membutuhkan dan memberikan pelatihan/petunjuk pelaksanaan dengan maksimal agar Implementasinya program tersebut tidak sia-sia, saya kira perlunya Sumber daya manusia yang baik”

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan kegiatan program sebagian besar pertanian kampung desa lukun tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program ketahanan pangan yang diberikan. Pengetahuan dan pemahaman pertanian desa lukun mengenai teknologi dan pembenihan masih terbatas karena minimnya informasi terkait perkembangan pelatihan/petunjuk pertanian yang diberikan pemerintahan desa.

Oleh karena itu, pada masa yang akan datang, sebaiknya pemerintah desa sering melakukan pertemuan untuk mensosialisasikan perkembangan pertanian. Dan Pemerintah Desa lukun dapat lebih memperhatikan lagi pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki dan dapat diterapkan secara menyeluruh dan pada gilirannya dapat meningkatkan produksi sebagai salah satu komoditas pertanian. Target yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesejahteraan para perantian masyarakat desa lukun kecamatan tebing tinggi timur.

Oleh karena itu, penting untuk melihat implementasi program ketahanan pangan yang telah dijalankan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berhasil mencapai tujuannya serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan pra penelitian diatas, Masalah yang diperoleh yaitu:

1. Kurang nya komunikasi dalam Sosialisasi dari pemerintahan desa kepada masyarakat yang telah ditetapkan dalam setahun, hasil pra survey sosialisasi yang semestinya dilaksanakan tiga kali pertahun dengan metode bertatap muka tetapi fakta dilapangan hanya disampaikan lewat whatsapp.
2. Sasaran bantuan yang diberikan oleh pemerintahan desa tidak maksimal, yang dimana kuota bantuan yang seharusnya diberikan dalam satu dusun 120 orang sesuai syarat yang ditetapkan, tetapi faktanya terdapat 15 orang dalam setiap dusun yang tidak sesuai kriteria dari syarat penerima bantuan tetap mendapat bantuan tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program ketahanan pangan di Desa Lukun, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tinjauan Pustaka

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, pasal 1 menjelaskan pangan adalah segala yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Isu penting dalam kerangka pembangunan pertanian dan pembangunan nasional adalah ketahanan pangan. Karena pangan merupakan kebutuhan manusia paling dasar manusia butuh, meningkat peningkatkan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam proyek konstruksi. Hal ini akan membantu perekonomian negara tumbuh (Ariani, 2002). Ketahanan pangan adalah problematik kompleks yang diartikan sebagai keadaan di mana individu pada saat itu harus segera mewujudkan akses fisik dan ekonomi dalam pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi pola makan dan preferensi makanan untuk hidup sehat dan aktif (Kenneth Ayuurebobi Ae-Ngibise, 2021).

Pantahanan adalah perlindungan dari ketahanan pangan keamanan yang mencapai berbagai aspek yang luas, yaitu setiap orang mencoba mewujudkan tujuan dan ke tersediaan data yang dimiliki. Sesuai menurut Reutlinger (1987) pernyataan, ada banyak cara untuk menafsirkan. Menurut Braun dkk (1992), penggunaan istilah ketahanan pangan akan menimbulkan berbagai isu yang membingungkan karena aspek ketahanan pangan sangat luas dan banyak, tetapi merupakan konsep yang sangat penting bagi banyak orang di Seluruh dunia.

Menurut asas ketahanan pangan Indonesia, mutu, keragaman, dan keamanan dipandang sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat memenuhi hajat hidup orang banyak dalam masyarakat pangan secara tuntas, adil, dan tepat waktu. Selain itu, kodifikasi konsep pangan rumah tangga ketahanan tahun 1996 juga menghasilkan definisi berikut: Ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan untuk memenuhi pangan anggota keluarga secara berkelanjutan, baik dari produksi maupun dari membeli dengan jumlah, mutu dan ragam segera harga sehari. (Saliem dan Ariani, 2016)

Meskipun demikian, Simatupang (1999) menegaskan bahwa tingkat ketahanan komunitas pangan merupakan syarat keharusan, namun tidak cukup menjamin pangan untuk seluruh rumah tangga. Apapun masalahnya, pangan tingkat regional merupakan

syarat wajib bagi pangan tingkat komunitas lokal, tetapi tidak cukup menjamin ketahanan pangan tingkat nasional tidak cukup menjamin terwujudnya pangan bagi semua orang, untuk mencukupi pangan agar sehat dan Dalam hal ini, untuk mencukupi pangan agar sehat dan produktif. (Saliem dan Ariani 2016)

Kebijakan pangan merupakan kebijakan paling strategis yang mewakili keutamaan kemanusiaan. Untuk mencapaitujuan mencapai puncak pangan berkelanjutan, perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan seperlunya pada lengkung kebijakan yang tengah dijalankan. Pendekatan arah kebijakan ini seperti cara penetapan tujuan, cara, serta sasaran pembangunan ketahanan pangan. Kebijakan pembangunan pangan ini diarahkan pada pemantapan ketahanan pangan untuk menjamin penyediaan pangan yang adil dan merata di tingkat masyarakat, rumah tangga dan individu yang sesuai dengan kemampuan daya beli untuk memenuhi gizi. (et al., Chaireni, 2020)

Definisi dan paradigma ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sejak adanya *Conference of Food and Agriculture* tahun 1943 yang mencanangkan konsep "*secure, adequate and suitable supply of food for everyone*". Definisi ketahanan pangan sangat bervariasi, namun umumnya mengacu definisi dari Bank Dunia (1986) dan Maxwell dan Frankenberger (1992) yakni: "*akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup sehat (secure access at all time to sufficient food for a healthy life)*".

Berikut beberapa definisi ketahanan pangan yang sering diberapaditanyakan (IranitaHaryono, 2020) :

1. Tanpa kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang diprioritaskan dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, terpenuhinya undang-undang pangan No. 7 Tahun 1996.
2. Menurut USAID (1992), setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan fisik setiap saat untuk memenuhi kebutuhan untuk kehidupan yang sehat dan produktif.
3. FAO (1997) mendefinisikan kondisi dimana setiap rumah tangga mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya finansial dan fisik untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarga; dengan kata lain, rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan sebagaimana disebutkan di atas.
4. Mercy Korps (2007), situasi ketika setiap orang memiliki akses terhadap sumber daya fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendukung kebutuhan keluarga mereka untuk kehidupan yang sehat setiap orang produktif setiap saat.
5. Word Bank (1996) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kemampuan setiap orang untuk memiliki akses terhadap pangan yang cukup untuk gaya hidup sehat dan aktif setiap saat.

Menurut definisi ini, ketahanan pangan mempunyai lima unsur pokok yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Berfokus pada individu dirumah dan rumah keluarga.
- b. Dimensi waktu yang tersedia setiap hari yang dapat diakses.
- c. Mendorong akses individu dan rumah tangga, baik sosial, ekonomi, maupun fisik.
- d. Perhatikan proses pencernaannya.
- e. Ditujukan untuk gaya hidup gaya hidup sehat dan produktif.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130 Tahun 2014 PeraturanKebutuhan dan Harga Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Sampai dengan Anggaran 2015, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah produk yang dalam proses pengadaannya mendapat pembiayaan dari pemerintah, khususnya subsidi untuk keperluan petani dan/atau

pemilik usaha tani di sektor pertanian. Sebagai komoditas komoditi di pasaran, makanan hewan peliharaan di dalam pada beberapa peraturan, termasuk peraturan presiden dan peraturan menteri. Menurut Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Penentuan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Pengawasan Sesuai Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2011. Prinsip ketahanan pangan Sesuai terhadap Peraturan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Proses Penetapan:

1. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
2. Keamanan Pangan adalah ke negara dandan Pengukuranyang diperlukan untuk melindungi pangan dari ancaman biologis, kimia, dan lain –lain yang dapat merugikan, dibutuhkan untuk melindungi, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak mengganggu agama, masyarakat, dan budaya sehingga aman untuk dikonsumsi.
3. Ketersediaan Pangan adalah kondisi keadaan pangan terkini yang bersumber dari hasil produksi nasional dan pangan cadangan, serta impor apabila kedua sumber utama tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan.
4. Penyelenggaraan Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, penyediaan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Metode

Jenis penelitian ini adalah tipe deskriptif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta mengetahui dan menjelaskan Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek atau subjek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relatif dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Alasan Peneliti Memilih tipe deskriptif dalam penelitian sangat relevan karena memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail tentang fenomena yang sedang diteliti. Deskripsi yang rinci dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang subjek penelitian dan membantu menyederhanakan informasi kompleks. Selain itu, tipe deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali emosi dan persepsi dari subjek penelitian, menjadikannya alat yang efektif untuk menyampaikan data kualitatif yang mendalam. Dengan memberikan deskripsi yang baik, penelitian menjadi lebih hidup dan menarik serta mendukung argumen atau temuan yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Kejelasan pesan dalam kebijakan Ketahanan Pangan

Kejelasan pesan dalam kebijakan ketahanan pangan di Desa Lukun mengacu pada bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat desa, sehingga mereka memahami tujuan, manfaat, dan cara pelaksanaannya. Berdasarkan informasi yang tersedia, kebijakan ketahanan pangan di desa-desa di Indonesia, termasuk

Desa Lukun, sering kali berhubungan dengan penggunaan Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan key informan yakni Anuar selaku Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari rabu, tanggal 09 April 2025 mengenai Kejelasan pesan dalam kebijakan ketahanan pangan, Sebagaimana dalam wawancara yang dilakukan :

"bahwa pemerintah desa telah berupaya menyampaikan tujuan utama dari kebijakan ketahanan pangan kepada masyarakat melalui beberapa cara, seperti musyawarah desa, sosialisasi langsung, serta penyampaian informasi melalui perangkat RT dan RW.

Anuar menjelaskan, tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan, serta membangun kemandirian desa dalam menghadapi ancaman krisis pangan. Bapak Anuar menegaskan bahwa program ini penting karena Lukun masih tergantung pada pasokan dari luar desa, sehingga perlu penguatan ketahanan pangan lokal.

Namun, beliau juga mengakui bahwa dalam praktiknya, penyampaian informasi kepada seluruh masyarakat belum sepenuhnya merata. Sebagian warga masih kurang memahami substansi program karena kurang aktif mengikuti kegiatan desa atau karena keterbatasan komunikasi dua arah yang belum berjalan optimal. Disampaikan juga bahwa ke depannya perlu pendekatan yang lebih intensif dan kreatif agar pesan kebijakan lebih mudah dipahami oleh semua kalangan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anuar, dapat dilihat bahwa secara normatif pemerintah desa telah menyusun pesan kebijakan dengan cukup jelas, namun tantangan muncul pada aspek penyampaian dan jangkauan informasi ke masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya *gap* antara perencanaan komunikasi dan realisasi di lapangan.

Konsistensi dan Keakuratan Informasi

Dalam implementasi suatu program, terutama yang bersifat strategis seperti program ketahanan pangan, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan di tingkat lapangan. Salah satu indikator utama dari komunikasi yang efektif adalah konsistensi dan keakuratan informasi.

Konsistensi informasi merujuk pada kesesuaian pesan yang disampaikan dari waktu ke waktu, tanpa adanya perubahan makna, kontradiksi, atau perbedaan isi yang membingungkan antara satu saluran komunikasi dengan yang lain. Informasi yang konsisten mencerminkan adanya pengendalian pesan dan keharmonisan antara data, pernyataan, dan tindakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan key informan yakni Anuar selaku Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari rabu, tanggal 09 April 2025 mengenai Konsistensi dan Keakuratan Informasi, Sebagaimana dalam wawancar yang dilakukan :

"Kami selalu berusaha untuk menyampaikan informasi yang berdasarkan data riil yang ada di lapangan. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan yang dilakukan oleh perangkat desa, seperti RT dan RW, serta dari laporan yang diberikan oleh kelompok tani dan masyarakat penerima manfaat. Kami juga memverifikasi data tersebut sebelum disampaikan, baik dalam rapat internal maupun saat sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan antara informasi yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lukun, dapat disimpulkan bahwa implementasi program ketahanan pangan di desa ini telah mempertimbangkan pentingnya konsistensi dan keakuratan informasi sebagai bagian dari proses komunikasi. Pernyataan kepala desa menunjukkan bahwa proses komunikasi dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak, seperti perangkat desa, kelompok tani, dan masyarakat.

Saluran Dan Media Komunikasi Yang Di gunakan

Dalam konteks komunikasi, saluran dan media komunikasi merujuk pada cara atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim (dalam hal ini pemerintah desa) kepada penerima (masyarakat). Pemilihan saluran dan media yang tepat sangat penting agar informasi dapat diterima secara efektif, dipahami dengan benar, dan ditindaklanjuti sesuai harapan. Adapun Media komunikasi yang digunakan pemerintahan desa pada menjalankan kegiatan program ketahanan pangan. Media Tradisional, Media Modern/digital, Media Interpersonal. Sebagaimana dijelaskan oleh Pak Anuar sebagai kepala desa sebagai berikut :

"Media komunikasi yang kami gunakan cukup beragam, tergantung situasinya. Biasanya kami menggunakan rapat langsung di kantor desa atau musyawarah dusun, itu yang paling umum. Selain itu, kami juga memanfaatkan WhatsApp grupRTatau kelompok tani, karena sekarang hampir semua warga sudah menggunakan HP. Kalau ada informasi penting, kami juga buat pengumuman lewat pengeras suara di masjid, dan kadang-kadang lewat spanduk atau baliho di tempat strategis agar mudah terlihat."

Dari wawancara dengan Kepala Desa Lukun diatas , terlihat bahwa media komunikasi yang digunakan bersifat campuran (hybrid) antara media tatap muka, digital, dan tradisional. Beberapa media yang disebutkan antara lain:

Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan

Pemerintah Desa Lukun secara rutin berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk memastikan bahwa program pangan berjalan sesuai kebijakan pemberdayaan masyarakat dan tidak tumpang tindih dengan program lain. DPMD juga mendorong desa untuk melakukan pendekatan partisipatif dalam pelaksanaan program, sesuai prinsip pemberdayaan.

wawancara oleh key informan dan infoman mengenai Koodinasi antar pemangku kepentingan, dan berikut peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Anuar sebagai Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti selaku key informan mengatakan :

"Ya, kami memiliki mekanisme komunikasi yang rutin. Setiap bulan, kami mengadakan pertemuan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait untuk membahas perkembangan program. Selain itu, kami juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan desa dan kelompok-kelompok masyarakat."

Hasil wawancara diatas bapak Anuar mejelaskan pemerintahan desa melakukan mengadakan pertemuan koodinasi dengan kecamatan dan dinas terkait untuk membahas perkembangan program tiap bulan nya, dimana tujuan ini untuk memastikiakan program yang dijalankan sukses dan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berada.

Efektivitas Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Partisipasi

Efektivitas dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi adalah kunci keberhasilan program ketahanan pangan desa. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan mandiri dan semakin aktif keterlibatan mereka, maka semakin besar kemungkinan program tersebut berhasil, berkelanjutan, dan berdampak jangka panjang bagi kesejahteraan desa.

Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Anuar selaku Kepala Desa Lukun Pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025, menyatakan bahwa:

"Kami mengukur partisipasi masyarakat melalui laporan kegiatan yang disusun oleh perangkat desa dan ketua-ketua program. Misalnya, dari tingkat kehadiran dalam musyawarah desa, gotong royong, atau pelatihan. Selain itu, kami juga memperhatikan seberapa aktif masyarakat menyampaikan ide atau ikut dalam pelaksanaan program. Saya juga sering turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mendengar aspirasi masyarakat."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Sebagai pimpinan tertinggi di desa, Kepala Desa menilai partisipasi dari sisi strategis dan kepemimpinan. Ia memantau secara langsung kegiatan masyarakat dan menggunakan laporan dari bawahannya (perangkat desa, ketua program, kepala dusun) sebagai alat ukur formal. Pendekatan langsung (turun ke lapangan) juga menjadi bagian dari metode partisipatif untuk merasakan antusiasme masyarakat secara nyata, bukan hanya dari data tertulis.

Staf

Staf dan petugas pengelolaan ketahanan pangan adalah individu yang ditunjuk atau ditugaskan oleh pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program-program yang berkaitan dengan ketahanan pangan di tingkat desa. Mereka bisa berasal dari perangkat desa, anggota kelompok tani, pendamping desa, atau masyarakat yang memiliki kapasitas dan komitmen untuk mendukung kegiatan ketahanan pangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa KampungLukun, Anuar menyampaikan bahwa:

"Kami sudah menunjuk beberapa staf dan petugas sesuai kebutuhan program. Namun memang masih ada kekurangan, khususnya dalam tenaga teknis dan pendamping lapangan. Kami mengandalkan kerja sama dengan kelompok tani dan nelayan untuk menutupi kekurangan tersebut."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah desa secara formal telah menetapkan struktur pelaksana, namun dalam praktiknya belum bisa memenuhi kebutuhan riil di lapangan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Ini menunjukkan adanya gap antara perencanaan dan implementasi.

Informasi

Informasi adalah data atau pesan yang telah diolah dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami, diakses, dan digunakan oleh penerima untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan tertentu. Dalam konteks pemerintahan desa, informasi berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan atau program yang dirancang pemerintah dengan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan berbagai informan kunci untuk memahami bagaimana informasi disampaikan dan diterima oleh pihak-pihak terlibat.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Anuar Kepala Desa Lukun, yang dijelaskan :

"Dalam menyampaikan informasi terkait program ketahanan pangan, kami menggunakan beberapa cara, seperti melalui rapat desa, penyuluhan oleh perangkat desa, dan juga melalui kelompok tani atau tokoh masyarakat. Kami juga memanfaatkan media sosial desa dan papan pengumuman di kantor desa. Harapannya, informasi bisa menjangkau seluruh warga, baik yang aktif dalam kegiatan desa maupun yang jarang terlibat."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lukun, dapat diketahui bahwa strategi penyampaian informasi mengenai program ketahanan pangan telah dirancang dengan pendekatan partisipatif dan multikanal. Strategi Desa Lukun dalam menyampaikan informasi program ketahanan pangan sudah memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik manusia (tokoh masyarakat, perangkat desa) maupun media (rapat, media sosial, papan informasi). Ini mencerminkan adanya kesadaran dan inisiatif dalam menciptakan sistem komunikasi yang inklusif. Namun, efektivitas strategi ini tetap bergantung pada kualitas komunikasi dan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Wewenang

Wewenang adalah hak atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan sesuai tanggung jawabnya. Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mencakup pengelolaan keuangan, aset, sumber daya manusia, dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam konteks ketahanan pangan, wewenang kepala desa digunakan untuk mengarahkan penggunaan Dana Desa, mengelola lahan, mengadakan pelatihan, serta bekerja sama dengan pihak terkait guna mendukung ketersediaan dan kemandirian pangan di tingkat desa.

Untuk memperoleh pemahaman lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anuar Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan :

"Sebagai Kepala Desa, saya memiliki kewenangan yang cukup luas dalam hal perencanaan dan pengelolaan sumber daya desa, terutama yang berkaitan dengan program-program pembangunan seperti ketahanan pangan. Kewenangan ini berdasarkan Undang-Undang Desa dan juga peraturan daerah yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa. Dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Lukun, saya mengarahkan sebagian anggaran dari Dana Desa untuk kegiatan seperti pengadaan bibit, pupuk, dan alat pertanian sederhana yang dibagikan kepada kelompok tani.

Selain itu, saya juga mengalokasikan lahan desa yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan kebun pangan bersama, yang dikelola oleh masyarakat secara gotong royong. Dalam pengambilan keputusan, saya selalu melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan tokoh-tokoh masyarakat melalui musyawarah desa. Kami juga mengadakan pelatihan pertanian dan penyuluhan agar masyarakat bisa meningkatkan hasil taninya. Jadi, melalui kewenangan yang saya miliki, saya arahkan agar semua potensi sumber daya baik manusia, anggaran, maupun lahan bisa dimaksimalkan untuk mendukung ketahanan pangan di desa kami."

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala Desa Lukun memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Desa dan peraturan daerah, serta dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat. Dalam praktiknya, kepala desa mengalokasikan Dana Desa untuk pengadaan bibit, pupuk, alat pertanian, serta

pelatihan bagi petani guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, lahan milik desa yang tidak termanfaatkan juga diarahkan menjadi kebun pangan kolektif, yang dikelola secara gotong royong oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan kepala desa digunakan secara strategis, partisipatif, dan berbasis kebutuhan lokal demi mendukung keberhasilan ketahanan pangan di Desa Lukun.

Fasilitas

Fasilitas adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan, termasuk dalam program ketahanan pangan desa. Fasilitas ini mencakup lahan pertanian, alat dan mesin pertanian seperti cangkul, dan pompa air, gudang penyimpanan hasil panen, saluran irigasi, rumah kompos, serta tempat pelatihan atau penyuluhan bagi petani. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting karena dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberhasilan program secara keseluruhan. Sebaliknya, keterbatasan fasilitas dapat menghambat jalannya program dan mengurangi dampak positif yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat desa.

Untuk memperoleh pemahaman lebih dalam, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anuar Kepala Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur menyatakan :

“Kalau bicara soal fasilitas, kami di Desa Lukun memang masih dalam tahap pengembangan. Beberapa fasilitas dasar untuk mendukung ketahanan pangan sudah ada, seperti lahan desa untuk kebun pangan bersama, gudang penyimpanan sederhana, dan alat pertanian yang dibeli dari Dana Desa. Namun, fasilitas yang lebih lengkap seperti irigasi permanen, rumah kompos, atau alat pertanian modern masih terbatas. Kami mengusahakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan juga melalui kerja sama dengan instansi terkait. Meskipun belum sempurna, fasilitas yang ada saat ini sudah cukup membantu petani dan kelompok tani dalam menjalankan kegiatan pertanian.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung untuk program ketahanan pangan di Desa Lukun sudah mulai disediakan oleh pemerintah desa, namun masih bersifat dasar dan terbatas. Fasilitas yang dimaksud meliputi lahan milik desa, gudang penyimpanan hasil panen, serta alat pertanian dasar seperti cangkul, pompa air, dan mesin semprot. Semua fasilitas tersebut dibeli secara bertahap melalui Dana Desa dan dirancang untuk dapat digunakan bersama oleh kelompok tani. Namun, keterbatasan sarana pendukung utama seperti sistem irigasi permanen, sarana pengolahan pasca-panen, dan alat pertanian modern menjadi kendala tersendiri dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Kepala desa menyadari pentingnya fasilitas ini, namun pengadaannya tergantung pada ketersediaan anggaran dan dukungan dari pemerintah daerah atau instansi teknis terkait.

Kesediaan dan Komitmen Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Kampung Lukun, Anuar menyampaikan bahwa:

“Sebagai kepala desa, saya sangat berkomitmen untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan ini tidak hanya sekedar berjalan, tapi juga berkelanjutan. Kami sudah mengalokasikan dana desa setiap tahunnya untuk program ini, khususnya dalam hal pengembangan pertanian dan peternakan. Selain itu, saya juga aktif mengajak masyarakat dan kelompok tani untuk terlibat, serta berkoordinasi dengan dinas terkait agar ada pendampingan dan pelatihan berkelanjutan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lukun, dapat disimpulkan bahwa disposisi atau respon pelaksana kebijakan, khususnya dalam hal kesediaan dan komitmen, menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Kepala desa menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program ketahanan pangan dengan cara mengalokasikan anggaran khusus dari dana desa, melibatkan masyarakat terutama kelompok tani, serta menjalin koordinasi dengan dinas terkait guna mendapatkan pendampingan teknis dan pelatihan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksana kebijakan tidak hanya memahami pentingnya program ketahanan pangan, tetapi juga memiliki kemauan dan tanggung jawab yang kuat untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan. Komitmen ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat desa.

Sikap Dan Persepsi Terhadap Kebijakan

Sikap dan persepsi terhadap kebijakan di Desa Lukun mencerminkan bagaimana masyarakat desa menanggapi dan memahami implementasi program ketahanan pangan yang dijalankan oleh pemerintah. Sikap masyarakat Desa Lukun dapat terlihat dari sejauh mana mereka mendukung, terlibat, atau justru merasa tidak puas terhadap pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, persepsi masyarakat mencerminkan penilaian mereka terhadap tujuan, manfaat, dan cara program itu dijalankan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi mereka sehari-hari. Jika masyarakat Desa Lukun memiliki sikap yang positif dan persepsi yang baik terhadap kebijakan ketahanan pangan, maka partisipasi mereka akan meningkat dan program tersebut lebih berpeluang untuk berhasil serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kampung Lukun, Anuar menyampaikan bahwa:

"Menurut saya, pemerintah desa sangat mendukung dan berperan aktif dalam pelaksanaan program ketahanan pangan ini. Sejak awal, kami ikut dalam perencanaan program, menyusun kegiatan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat di Desa Lukun mayoritas bekerja sebagai petani dan nelayan, jadi program ini memang sangat membantu, terutama dalam hal penyediaan bibit, pelatihan, dan peningkatan hasil produksi. Saya melihat program ini cukup tepat sasaran dan sangat dibutuhkan masyarakat. Kami di pemerintahan desa terus berupaya agar program ini berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, disposisi atau respon pemerintah Desa Lukun terhadap program ketahanan pangan menunjukkan sikap yang positif dan mendukung. Kepala desa menilai bahwa program ini sangat penting dan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama yang bekerja di sektor pertanian. Pemerintah desa juga terlibat aktif dalam perencanaan hingga pelaksanaan program, serta berupaya menyesuaikan kegiatan dengan kondisi lokal. Sikap ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari pihak desa dalam menyukseskan program, yang menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat desa.

Konsistensi dalam Implementasi

Konsistensi dalam implementasi program ketahanan pangan di Desa Lukun mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam menjaga keberlangsungan program. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan yang terencana, serta koordinasi yang terjaga antar aparatur desa. Kepala Desa Lukun memastikan

bahwa setiap kegiatan yang dirancang sesuai dengan tujuan program benar-benar dijalankan dengan standar yang sama dari waktu ke waktu. Rapat mingguan dan evaluasi bulanan menjadi wadah untuk mengukur progres serta memperbaiki kekurangan yang ada. Selain itu, kepala desa juga menegaskan pentingnya sikap disiplin dan komitmen aparatur, serta memberikan arahan langsung agar pelaksanaan program tidak hanya berjalan formalitas, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, konsistensi implementasi semakin kuat karena adanya kontrol sosial yang mendukung akuntabilitas. Secara keseluruhan, konsistensi ini menjadi dasar penting agar program ketahanan pangan tidak hanya terlaksana, tetapi juga memberi dampak nyata bagi warga Desa Lukun.

Untuk memahami lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anuar selaku Kepala Desa menyatakan :

"Kami selalu mengadakan rapat rutin dengan seluruh perangkat desa, termasuk tim pelaksana program ketahanan pangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Kami juga memberikan arahan secara langsung agar seluruh aparatur desa memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang kuat terhadap tujuan program ini. Konsistensi dijaga dengan monitoring berkala dan evaluasi kinerja, serta pendekatan personal jika ditemukan aparat yang kurang aktif. Selain itu, kami libatkan masyarakat dalam pengawasan sehingga ada dorongan dari luar juga."

Berdasarkan hasil wawancara, disposisi aparatur desa terhadap program ketahanan pangan di Desa Lukun menunjukkan sikap yang cukup konsisten, terutama karena adanya arahan langsung dari kepala desa, rapat rutin, serta monitoring berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Kepala desa juga melakukan pendekatan personal kepada aparat yang kurang aktif agar tetap terlibat, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk menjaga akuntabilitas. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen pimpinan dalam memastikan seluruh perangkat desa memahami dan melaksanakan program secara berkesinambungan, sehingga implementasi berjalan sesuai tujuan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau aturan yang jelas dan sistematis mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tertentu, dalam hal ini adalah Implementasi Program Ketahanan Pangan Desa Lukun. SOP berfungsi sebagai panduan yang mengatur setiap tahapan dalam proses pelaksanaan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun hasil wawancara dengan key informan dan informan mengenai SOP dalam Implementasi Program Ketahanan Pangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Kami sudah mencoba menerapkan SOP dalam pelaksanaan program ini, misalnya dalam tahap perencanaan dan penyaluran bantuan. Namun, masih ada perangkat desa yang belum sepenuhnya paham bagaimana alur SOP itu diterapkan. Koordinasi antar perangkat sudah kami lakukan melalui rapat mingguan, tapi memang perlu penguatan, terutama dalam dokumentasi dan pelaporan kegiatan."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lukun, diperoleh informasi bahwa penerapan SOP dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Lukun sudah mulai dilaksanakan, namun masih menghadapi beberapa tantangan. Kepala Desa menyatakan bahwa perangkat desa telah memiliki pembagian tugas yang cukup jelas, namun belum semua perangkat memahami isi dan alur SOP secara menyeluruh.

Hierarki dan Koordinasi Antar lembaga

Hierarki antarlembaga adalah susunan tingkatan wewenang dan tanggung jawab dalam struktur organisasi yang menunjukkan alur perintah dan pengambilan keputusan dari tingkat atas ke tingkat bawah, sehingga setiap lembaga atau unit kerja mengetahui peran dan tugasnya secara jelas. Sedangkan koordinasi antarlembaga adalah proses penyelarasan aktivitas dan komunikasi antara berbagai lembaga agar mereka dapat bekerja sama secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama, menghindari tumpang tindih tugas, serta memastikan program berjalan lancar. Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di desa, hierarki memastikan adanya garis komando yang jelas, sementara koordinasi menjamin sinergi antar lembaga sehingga program dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Untuk memahami lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Anuar selaku Kepala Desa menyatakan :

“Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Lukun, hubungan hierarki berjalan sesuai dengan struktur pemerintahan yang ada. Pemerintah desa berperan sebagai pelaksana langsung program di tingkat desa, sementara arahan dan kebijakan berasal dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan dinas terkait. Kami rutin melakukan koordinasi dengan instansi seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan penyuluh lapangan. Koordinasi ini biasanya dilakukan melalui rapat rutin, pertemuan musyawarah, serta komunikasi langsung agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan target.

Namun, saya akui bahwa kadang koordinasi ini belum berjalan sempurna, terutama saat ada perubahan kebijakan atau kendala di lapangan, informasi terkadang terlambat sampai ke kami. Selain itu, masih ada beberapa lembaga pendukung yang belum terlalu aktif terlibat secara langsung di desa, sehingga kami perlu lebih proaktif dalam menjalin komunikasi dengan mereka.

Meski begitu, secara umum hubungan hierarki dan koordinasi antar lembaga sudah cukup baik dan mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan. Kami terus berusaha memperbaiki komunikasi dan sinergi agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Desa Lukun.”

Berdasarkan wawancara diatas Jawaban Kepala Desa Lukun mengindikasikan bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan di desa mengikuti struktur birokrasi yang telah ditetapkan, dimana pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan, sementara kebijakan dan arahan datang dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa secara hierarkis hubungan antar lembaga berjalan secara vertikal dan sistematis.

Pembagian Tugas dan Wewenang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lukun, diperoleh informasi bahwa pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program ketahanan pangan dilakukan dengan mengacu pada struktur pemerintahan desa yang telah ditetapkan. Kepala desa menyatakan bahwa setiap perangkat desa memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang telah disesuaikan dengan kapasitas, jabatan, dan bidang kerja.

Kepala Desa Bapak Anuar menyampaikan :

“Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, kami membagi tugas berdasarkan struktur organisasi yang ada. Sekretaris desa kami tugaskan untuk administrasi dan pelaporan, Kaur Perencanaan bertugas merancang kegiatan, sedangkan pelaksanaan teknis di lapangan kami

libatkan langsung kepala dusun dan juga LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Selain itu, kami juga bekerja sama dengan kelompok tani dan tokoh masyarakat agar pelaksanaan program ini bisa tepat sasaran dan partisipatif."

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Desa Lukun dilakukan berdasarkan struktur organisasi desa yang sudah ada. Setiap perangkat desa diberikan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya, seperti sekretaris desa untuk administrasi, kaur perencanaan untuk perencanaan kegiatan, serta kepala dusun dan LPM untuk pelaksanaan di lapangan. Selain itu, keterlibatan kelompok tani dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya membangun kerja sama yang partisipatif. Hal ini mencerminkan adanya sistem birokrasi yang berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi secara formal, dan masih memerlukan penguatan dalam hal koordinasi dan pelatihan perangkat desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Program Ketahanan Pangan di Desa Lukun Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti*, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal. Meskipun secara perencanaan program ketahanan pangan ini telah memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta alokasi anggaran yang memadai dari dana desa, namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan program secara maksimal.

Program ketahanan pangan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui kegiatan pertanian dan perikanan, khususnya kepada kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh kondisi sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kurangnya akses terhadap pangan. Namun dalam praktiknya, program ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan karena proses verifikasi data dan penentuan penerima bantuan tidak berjalan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Alfia, L. (2016). Implementasi Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah administrasi Publik*, 2(3), 49-58.
- Ali Zaini, & Al Hafis Raden Imam, (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Hamim, Sufian & ddk. (2005). *Organisasi dan Manajemen*. (TT).
- Pasalong Harbani. (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Fitharyyah, Ummul, Mustiqowati. (2021) *Dasar-dasar Teori Organisasi*. Jakarta : Institute for Research and Deveploment.
- Aromatica, Desna & Sudrajat,rahman, arip. (2021). *Teori Organisasi*. Jawa Tengah : CV. Amerta Media.
- Arafat. (2023) *Kebijakan Publik;Teori dan Praktik*. Malang : PT. Lestari Nusantara Abadi Group.
- Sugiyono. (2010) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA,CV.
- Abdoellah, Y Awan. (2016) *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA, CV.

- Majid Jamaludin. 2023. *Manajemen Sektor Publik Konsep dan Teori*. Jawa Tengah : CV. Sketsa Media.
- Amri Darwis. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Pekanbaru: Suska press.
- Apriyanto, M., Alfa, A., Surya, R. Z., Satriawan, K. N., & Azhar, A. (2023). Implementasi Kebijakan Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 361– 368. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i2.510>
- Ara Lili, Marselina. (2018). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagen Karya, Kecamatan Lumar. Artikel Ilmiah Universitas Tanjung Pura.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di

- Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.

- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.

- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.

- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.

- Handrian, E. (2024). E-govqual Aplikasi PEKA (Pekan Kita) Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 74-89.
- Handrian, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Riau (Studi Tujuan Pertama: Kemiskinan) Di Kota Pekanbaru. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 708-729.
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Khan, M. C. (2021). Model Inkremental: Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 1-12.
- Nurman, Yusradi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah. Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahtan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.

- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*. Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.

- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2). Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogია, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional Government in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 16(1), 37-53.

- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science*, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99. Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9. Lubis, E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126. Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".